

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh GCG terhadap EM pada industri perbankan masih belum banyak dilakukan. Kebanyakan peneliti meneliti mengenai GCG terhadap EM pada perusahaan manufaktur. Di bawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini beserta perbedaan dan persamaanya:

1.1.1. Nurning Mahmudah (2013)

Penelitian ini menganalisis pengaruh komisaris independen, keberadaan komite audit, dewan direksi, dan ukuran dewan komisaris terhadap EM pada perusahaan yang masuk di daftar efek syari'ah. Sampel dalam penelitian ini adalah 9 perusahaan yang masuk di Daftar Efek Syari'ah (DES) yang mengikuti program CGPI dan dipublikasikan melalui majalah SWA dari tahun 2007-2011. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*. Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis pembahasan, komisaris independen, komite audit, dewan direksi, dan ukuran dewan komisaris terbukti berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap EM. Keempat variabel tersebut mampu memprediksi EM sebesar 13,1% dan sisanya sebesar 86,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Uji secara parsial atau pada uji t menunjukkan bahwa hanya ada satu variabel yang signifikan terhadap EM yaitu ukuran dewan komisaris.

1.1.2. Chi-keung Man & Brossa Wong (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh GCG dalam pengurangan atau bahkan menghilangkan tingkat EM. Biasanya, lingkungan kelembagaan yang menyediakan perlindungan hukum yang lebih baik dapat mengontrol kepentingan manajer sampai batas tertentu. Pengambilalihan wewenang dapat mengakibatkan tekanan pada pasar dan manajer bisa melakukan yang terbaik bagi pemegang saham. Independensi dewan dapat memantau peningkatan perilaku manajer, termasuk penyalahgunaan asset. Komite audit dapat mengawasi control internal untuk pelaporan keuangan dan kualitas informasi keuangan. Direksi dengan keahlian keuangan dapat memberikan efek inkremental pengendalian EM, terutama di perusahaan dengan tata kelola usaha yang lemah.

1.1.3. Miranty Nurhayati & Henny Medyawati (2012)

Penelitian ini memberikan informasi mengenai pengaruh ROE sebagai proksi dari kinerja keuangan, kepemilikan manajerial sebagai proksi dari GCG dan pengungkapan CSR terhadap Tobin's Q sebagai proksi dari nilai perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis (a) pengaruh ROE terhadap Tobin's Q (b) pengaruh GCG terhadap Tobin's Q (c) pengaruh CSR terhadap nilai Tobin's Q. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ-45 yang terdaftar dalam *Indonesia Stock Exchange (IDX)* dalam rentang tahun 2009-2011.

1.1.4. Dhaniel Syam, Taufik Najda (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran klaim IB mengenai kualitas penerapan GCG pada bank umum syariah di Indonesia yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah PBI No. 11/33/PBI Tahun 2009 yang secara rinci diatur dalam SE BI No. 12/13/DPbS tahun 2010. Upaya pengujian yang dilakukan adalah dengan menganalisis kualitas penerapan GCG pada bank Syariah sekaligus menguji pengaruhnya terhadap dua hal yang tak terpisahkan dari industri perbankan yaitu tingkat pengembalian dan risiko. Adapun Pengukuran kualitas pada penelitian dibatasi hanya pada penerapan GCG oleh perbankan syariah yang dilaporkan dalam laporan tahunan bank periode 2010.

1.1.5. Bayu Fatma Widiatmaja (2010)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme GCG, yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit terhadap EM, penelitian ini juga menguji konsekuensi manajemen laba terhadap kinerja keuangan pada 42 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan menggunakan *purposive sampling* yang menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2006-2008. Secara simultan semua variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan secara parsial menunjukkan hasil bahwa EM berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

1.1.6. Marihot Nasution & Doddy Setiawan (2007)

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan GCG terhadap praktek EM yang terjadi di perusahaan perbankan. Dari hasil pengujian regresi linear berganda ditemukan bahwa secara individual, komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap EM perusahaan perbankan. Metode pengambilan data menggunakan *purposive sampling*, dengan jumlah perusahaan yang diteliti sebanyak 20 bank dan pendekatan EM menggunakan model *Beaver and Engel* (1996).

1.1.7. Sylvia Veronica N.P. Siregar & Siddharta Utama (2005)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek GCG terhadap besaran pengelolaan laba. Struktur kepemilikan dibedakan menjadi kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan diukur menggunakan kapitalisasi pasar, dan praktek GCG diukur menggunakan tiga variabel (kualitas audit, proporsi dewan komisaris independen, dan keberadaan komite audit). Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Penelitian ini menggunakan data empiris dari Bursa Efek Jakarta dengan sampel sebanyak 144 perusahaan untuk periode non krisis (1995-1996, 1999-2002). Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besaran pengelolaan laba adalah ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga. Variabel kepemilikan institusional dan ketiga variabel praktek GCG tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besaran pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan.

Tabel 2.1

Ringkasan Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Sekarang

No	Penelitian Terdahulu	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Nurning Mahmudah	2013	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan variabel bebas yang sama yaitu GCG b. Menggunakan variabel terikat yang sama yaitu EM c. Teknik pengambilan data yang sama, yaitu <i>purposive sampling</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian terdahulu menggunakan 4 indikator pada variabel independen, sekarang menggunakan 11 indikator pada variabel independen b. Penelitian terdahulu periodenya 2007-2011, sekarang 2008-2012 c. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang masuk di Daftar Efek Syariah (DES), sekarang kriteria yang digunakan adalah bank umum nasional yang menyampaikan laporan <i>Good Corporate Governance</i> di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2012
2	Chi-keung Man & Brossa Wong	2013	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan variabel bebas yang sama yaitu GCG b. Menggunakan variabel terikat yang sama yaitu EM 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian terdahulu menggunakan indikator independensi dewan, komite audit, dan direksi pada variabel independen, sekarang menggunakan 11 indikator pada variabel independen
3	Miranty Nurhayati & Henny Medyawati	2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Satu variabel bebas yang digunakan sama yaitu GCG 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian terdahulu menggunakan dua variabel bebas yaitu kinerja keuangan dan CSR, sekarang menggunakan satu variabel bebas yaitu GCG b. Penelitian terdahulu menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel terikat, sekarang menggunakan EM sebagai variabel terikat c. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan LQ-45 yang terdaftar dalam <i>Indonesia Stock Exchange (IDX)</i> dalam rentang tahun 2009-2011, sekarang kriteria yang digunakan adalah bank umum nasional yang menyampaikan laporan GCG di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2012
4	Dhaniel Syam, Taufik Najda	2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan nilai komposit dalam pengukuran GCG b. Variabel independen sama yaitu GCG 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peneliti terdahulu menggunakan Bank Syariah dalam meneliti obyek penelitian, sekarang menggunakan Bank konvensional dalam melakukan penelitian b. Penelitian terdahulu menggunakan

				variabel dependen adalah tingkat pengembalian dan risiko pembiayaan, sedangkan penelitian sekarang menggunakan EM sebagai variabel dependen
5	Bayu Fatma Widiatmaja	2010	a. Menggunakan variabel bebas yang sama yaitu GCG b. Teknik pengambilan data yang sama, yaitu <i>purposive sampling</i>	a. Penelitian terdahulu menggunakan 5 indikator pada variabel independen, sekarang menggunakan 11 indikator pada variabel independen b. Penelitian terdahulu menggunakan 42 perusahaan yang masuk di Bursa Efek Indonesia (BEI), sekarang kriteria yang digunakan adalah bank umum nasional yang menyampaikan laporan GCG di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2012
6	Marihot Nasution & Doddy Setiawan	2007	a. Obyek penelitian sama-sama pada industri perbankan b. Model pengukuran EM sama-sama menggunakan <i>Beaver and Engel (1996)</i> c. Teknik pengambilan data yang sama, yaitu <i>purposive sampling</i>	a. Penelitian terdahulu menggunakan 4 indikator dalam mengukur GCG yaitu dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit, dan ukuran perusahaan. Sedangkan sekarang menggunakan nilai komposit dalam mengukur GCG
7	Sylvia Veronica N.P. Siregar & Siddharta Utama	2005	a. Satu variabel bebas yang digunakan sama yaitu <i>good corporate governance</i> b. Menggunakan variabel terikat yang sama yaitu EM	a. Penelitian terdahulu menggunakan dua variabel bebas yaitu struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan, sekarang menggunakan satu variabel bebas yaitu GCG b. Penelitian terdahulu menggunakan data empiris dari Bursa Efek Jakarta dengan sampel sebanyak 144 perusahaan untuk periode non krisis (1995-1996, 1999-2002), sekarang kriteria yang digunakan adalah bank umum nasional yang menyampaikan laporan GCG di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2012

1.2 Landasan Teori

Dalam sub bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari penelitian, dimana akan dijelaskan secara sistematis mulai dari teori-teori yang bersifat

umum menuju teori yang bersifat khusus sehingga dapat menentukan kerangka pikir penelitian serta hipotesis penelitian.

1.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*), menjelaskan mengenai hubungan agensi yang terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut Jensen dan Mecking (1976). Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami GCG, dan hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. *Principal* adalah pemegang saham atau investor sedangkan *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen.

Menurut Ujiyantho dan Pramuka, 2007 dalam Bayu Fatma Widiatmaja (2010) teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut sebagai manusia akan berindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. Manajer yang mempunyai hak pengendalian dapat melakukan penyelewengan dan bisa menimbulkan masalah keagenan yang dapat diartikan dengan sulitnya investor memperoleh keyakinan bahwa dana yang mereka investasikan dikelola dengan semestinya oleh manajer.

Manajer memiliki kewenangan untuk mengelola perusahaan dan dengan demikian manajer memiliki hak dalam mengelola dana investor Ujiantho (2007).

Adanya pemisahan wewenang antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pengelola oleh manajemen (*agent*) cenderung menimbulkan konflik keagenan di antara prinsipal dan agen. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) Ujiyantho dan Pramuka (2007). *Agency cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk biaya pengawasan terhadap agen, pengeluaran yang mengikat oleh agen, dan adanya *residual loss* Jensen dan Meckling (1976). *Residual loss* adalah, nilai uang yang timbul dari adanya penyimpangan antara keputusan yang diambil agen dan keputusan yang akan meningkatkan kesejahteraan prinsipal sehingga dapat menimbulkan kerugian atau pengurangan kesejahteraan prinsipal Jensen dan Meckling (1976).

Prinsipal yang tidak dapat selalu memonitor aktivitas manajemen untuk memastikan apakah manajemen telah bekerja sesuai dengan keinginan principal dapat mengakibatkan konflik kepentingan. Terkadang informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Keadaan seperti ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*) Wibisono (2004).

Adanya asimetri informasi tersebut dapat mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal untuk memaksimalkan keuntungan bagi agen. Agen dapat termotivasi untuk melaporkan

informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen Ujiantho (2007).

1.2.2. *Good Corporate Governance*

Menurut Effendi (2009:2) pengertian GCG adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang Bersih, Transparan, dan Profesional (BTP). Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan GCG sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan Effendi (2009).

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika (*ethics value*) yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PBI menjelaskan bahwa dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, Bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan GCG. Berdasarkan Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum Konvensional di Indonesia pada tanggal 29 April 2013, Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan

Komisaris, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, dan rekomendasi Dewan Komisaris.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi adalah jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Direksi tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi; dan rekomendasi Dewan Komisaris.
3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite adalah struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite, tugas dan tanggung jawab Komite, frekuensi rapat Komite, dan program kerja Komite dan realisasinya.
4. Penanganan benturan kepentingan terdiri dari informasi lain yang terkait dengan GCG Bank berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.
5. Penerapan fungsi kepatuhan terdiri dari tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.
6. Penerapan fungsi audit intern terdiri dari efektivitas dan cakupan audit intern dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank.
7. Penerapan fungsi audit ekstern terdiri dari efektivitas pelaksanaan audit ekstern dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan mengenai:
 - 1) Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank konvensional; atau

- 2) Hubungan antara Bank Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia bagi Bank Syariah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. Informasi yang perlu diungkap adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
 9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*). Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/*group* inti per posisi laporan.
 10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya; dan
 11. Rencana strategis Bank meliputi:
 - a. Rencana jangka panjang (*corporate plan*); dan
 - b. Rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*).

Jumlah nilai dari sebelas indikator disebut dengan nilai komposit, nilai komposit tersusun menjadi lima, yaitu nilai sangat baik apabila nilai komposit kurang dari 1,5, penilaian baik diukur kurang dari samadengan 1,5 sampai dengan 2,5, penilaian cukup baik apabila nilai komposit kurang dari sama dengan 2,5

sampai dengan 3,5, penilaian kurang baik diukur kurang dari samadengan 3,5 sampai dengan 4,5, penilaian tidak baik apabila nilai komposit kurang dari samadengan 4,5 sampai dengan kurang dari 5. Sedangkan peringkat kesehatan Bank dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 terbagi menjadi lima katagori, yaitu peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*), dan peringkat 5 (*high*), semakin kecil suatu peringkat maka Bank tersebut dikatakan sehat dan nilai kompositpun akan dikatakab baik pula.

1.2.3. Manajemen Laba (*Earning Management*)

Setiawati dan Na'im (2000) mendefinisikan EM sebagai campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan adalah EM. EM menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakaian laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa. EM perusahaan merupakan tindakan manajer untuk merekayasa laba sesuai dengan laba yang diharapkan oleh pihak manajemen. Secara umum EM dapat dibedakan menjadi dua katagori, yaitu EM melalui kebijakan akuntansi dan EM melalui aktivitas riil. EM dengan menggunakan kebijakan akuntansi merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan menggunakan teknik dan kebijakan akuntansi. Sedangkan, EM riil dilakukan melalui permainan laba yang dilakukan melalui aktivitas-

aktivitas yang berasal dari kegiatan bisnis normal atau yang berhubungan dengan kegiatan operasional.

Deddy, *et al* (2011:40) menjelaskan bahwa EM dapat dilakukan dengan membesarkan atau mengecilkan laba dan bisa juga dengan melakukan perataan laba atau *income smoothing*. (Scott, 2000 dalam Kusindratno dan Sumarta, 2005) menjelaskan bahwa terdapat empat pola EM, yaitu :

(1) *Taking a bath*

Pola ini dilakukan dengan cara mengatur laba perusahaan tahun berjalan menjadi sangat tinggi atau rendah dibandingkan laba periode tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Hal tersebut, dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari pada periode berjalan, dengan cara melakukan penghapusan (*write off*) terhadap asset tertentu dan mengakui biaya-biaya pada periode-periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan, agar dapat memperoleh kinerja yang baik di masa yang akan datang saat kondisi perekonomian lebih menguntungkan.

(2) *Income minimization*

Pola ini dilakukan dengan menjadikan laba periode tahun berjalan lebih rendah dari laba sebenarnya. Hal tersebut dilakukan pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis dan karena motivasi perpajakan. Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebanan pengeluaran iklan, riset dan pengembangan yang cepat dan sebagainya. Cara ini mirip dengan *taking a bath* namun kurang ekstrim.

(3) *Income maximization*

Pola ini dilakukan dengan cara menjadikan laba tahun berjalan lebih tinggi dari laba sebenarnya dengan menggunakan beberapa macam teknik. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk memaksimalkan laba agar memperoleh bonus yang lebih besar. Demikian pula dengan perusahaan yang mendekati suatu pelanggaran kontrak hutang jangka panjang, manajer perusahaan tersebut akan cenderung untuk memaksimalkan laba. Biasanya manajer dalam melakukan tindakan *income maximization* menggunakan cara menunda pelaporan biaya-biaya periode tahun berjalan ke periode mendatang, dengan pemilihan metode akuntansi yang dapat memaksimalkan laba sampai dengan meningkatkan jumlah produksi dan penjualan.

(4) *Income smoothing*

Pola ini dilakukan melalui *income smoothing* dengan cara menaikkan atau menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak berisiko tinggi. Investor dan kreditur yang memiliki sifat *risk adverse*, menganggap kestabilan laba merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan karena semakin laba perusahaan mengalami fluktuasi, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan berisiko.

Menurut Deddy, *et al* ,2011 dan Scott ,2000 dalam Wedari (2004), ada beberapa motivasi manajer dalam melakukan EM, yaitu :

a) Rencana Bonus (*bonus scheme*)

Motivasi ini dilakukan ketika kondisi manajer ingin mendapatkan bonus yang berasal dari pemegang saham berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Manajer dengan rencana bonus akan menghindari metode akuntansi yang mungkin melaporkan *net income* lebih rendah. Manajer menggunakan laba akuntansi untuk menentukan besarnya bonus, hal ini cenderung dilakukan manajer untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat memaksimalkan laba.

b) Motivasi Perpajakan (*taxation motivation*)

Motivasi perpajakan merupakan motivasi EM yang paling nyata karena setiap perusahaan ingin meminimalisir laba agar pajak yang dibayarkan juga minimal. Sebagai contoh, cara yang dilakukan misalnya merubah metode pencatatan persediaan menjadi LIFO agar laba bersih yang dihasilkan rendah.

c) Motivasi Perjanjian Hutang (*Debt Covenant*)

Motivasi perjanjian hutang merupakan motivasi manajer untuk dapat mengecilkan laba karena alasan untuk memenuhi perjanjian hutang yang timbul dari kontrak hutang jangka panjang. Manajer akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat “memindahkan” laba periode mendatang ke periode berjalan sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak.

d) Motivasi Penjualan Saham

Motivasi ini digunakan oleh perusahaan yang akan *go public* ataupun yang sudah *go public*. Perusahaan berkeinginan untuk memperoleh modal usaha dari investor dengan cara menjual sahamnya, sehingga manajer akan melakukan EM dengan menunjukkan laba yang besar agar investor tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut. Informasi ini dapat dipakai sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan.

e) Motivasi Pergantian Direksi

Praktik EM biasanya terjadi sekitar periode pergantian direksi, hal tersebut terjadi karena seiring berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung memaksimalkan laba agar terlihat baik di akhir masa jabatannya. Motivasi ini bertujuan untuk memperoleh bonus yang maksimal di akhir masa jabatannya.

f) Motivasi Politis

Manajer cenderung menyajikan laba yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya, hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi visibilitas perusahaan sehingga tidak menarik perhatian pemerintah, media atau konsumen yang dapat menyebabkan meningkatnya biaya politis karena biaya politis yang rendah dapat menguntungkan pihak manajemen. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah misalnya subsidi.

Pendeteksian perilaku EM dalam perusahaan dapat dilakukan dengan cara pengukuran total akrual. Menurut Djakman (2003) tindakan EM dapat dilakukan

melalui kebijakan akrual. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan kebijakan akrual, berikut ini kutipan definisi kebijakan akrual dari Financial Accounting Standard Board (FASB, 1978):

“Accrual accounting attempts to record the financial effects on an entity of transactions and other events and circumstances the have cash consequences for the entity in the periods in which those transactions, events, and circumstances occur rather than only in the periods in which cash is received or paid by the entity”.

Total akrual adalah selisih laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Pengukuran total akrual dapat dibedakan menjadi dua yaitu *discretionary accruals* dan *non discretionary accruals*. Menurut Yang, *et al*, (2009) menyatakan:

“The magnitude of discretionary accruals is indicated as a percentage of assets of a firm. The higher the value of discretionary accruals, the greater the earnings is manipulated. Earnings management may take the form of either income-increasing or income-decreasing accounting choices. income-increasing manipulation means positive discretionary accruals whwreas income-decreasing indicate negative discretionary accruals”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya akrual diskresioner dapat diindikasikan sebagai persentase dari asset perusahaan. Semakin tinggi nilai akrual diskresioner, maka semakin besar laba yang dimanipulasi. EM dapat menjadi pilihan akuntansi dengan perhitungan laba yang meningkat atau menurun. Peningkatan laba berarti manipulasi akrual di diskresioner positif sedangkan penurunan pendapatan mengindikasikan akrual diskresioner yang negatif.

Welvin dan Arleen (2010) mendeskripsikan *discretionary accruals* adalah komponen akrual yang memungkinkan manajer untuk melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga laba yang dilaporkan dalam

laporan keuangan tidak mencerminkan nilai atau kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Komponen *discretionary accruals* diantaranya terdiri dari penilaian piutang, pengakuan biaya garansi (*future warranty expense*), dan asset modal (*capitalization assets*). Sedangkan komponen *non discretionary accruals* ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diawasi oleh pihak manajer.

Berikut dijelaskan beberapa model dalam pengukuran EM, yaitu :

1. *The Jones Model*

Jones (1991) mengajukan model yang menolak asumsi bahwa *non discretionary accrual* adalah konstan. Model ini mencoba mengontrol pengaruh perubahan keadaan ekonomi perusahaan pada *non discretionary accrual* sebagai berikut :

$$NDA_t = \alpha_1 1/TA_{t-1} + \alpha_2 \Delta REV_t / TA_{t-1} + \alpha_3 PPE_t / TA_{t-1}$$

Keterangan :

ΔREV_t = Revenue pada tahun t dikurangi revenue pada tahun t-1 dibagi total aktiva tahun t-1.

PPE_t = *Gross property plan and equipment* pada tahun t dibagi total aktiva tahun t-1

A_{t-1} = Total aktiva tahun t-1

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = *Firm-spesific parameters*

Secara detail, dengan *Jones Model*, penentuan akrual diskresioner sebagai indikator EM dijabarkan dalam tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menentukan nilai total akrual (TA) dengan formulasi:

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

2. Menentukan nilai parameter α_1 , α_2 dan α_3 dengan formulasi:

$$TA_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 \Delta R_{evit} + \alpha_3 PPE_{it} + \varepsilon_{it}$$

3. Kemudian, untuk mensakala data, semua variable tersebut dibagi dengan asset tahun sebelumnya (A_{it}) sehingga formulasinya berubah menjadi:

$$TA_{it} / A_{it-1} = \alpha_1 (1/ A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta R_{evit} / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it} / A_{it-1}) + \varepsilon_{it}$$

4. Menghitung nilai akrual nondiskresioner (NDA) dengan formulasi:

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1/ A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta R_{evit} / A_{it-1} - \Delta R_{ecit} / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it} / A_{it-1})$$

5. Menentukan nilai akrual diskresioner yang merupakan indikator EM akrual dengan cara mengurangi total akrual dengan nondiskresioner, dengan formulasi:

$$DA_{it} = TA_{it} - NDA_{it}$$

2. *The Baever and Engel Model*

Beaver and Engel (1996), model tersebut dihitung menggunakan NDA_{it} , maka dilakukan langkah-langkah berikut :

$$1. TA_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 CO_{it} + \alpha_2 LOAN_{it} + \alpha_3 NPA_{it} + \alpha_4 \Delta NPA_{it+1} + \varepsilon$$

TA_{it} adalah Total akrual. Untuk mengetahui total akrual, digunakan saldo penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dan untuk mendapatkan koefisien total akrual semua variabel EM, diantaranya CO_{it} , $LOAN_{it}$, NPA_{it} , ΔNPA_{it} terlebih dahulu didefinisi dengan nilai buku ekuitas dan cadangan kerugian pinjaman (nilai kotor). Dari hasil diatas, maka didapatkan hasil koefisien

regresi *non discretionary accrual*.

2. Rumus *non discretionary accrual* (NDA_{it})

$$NDA_{it} = TA_{it} - [\alpha_0 + \alpha_1 CO_{it} + \alpha_2 LOAN_{it} + \alpha_3 NPA_{it} + \alpha_4 \Delta NPA_{it+1}]$$

TA_{it} : Total akrual (saldo PPAP) bank i pada tahun t

DA_{it} : Akrual kelolaan bank i pada tahun t

CO_{it} : *Loan change offs* (pinjaman yang dihapusbukukan)

$LOAN_{it}$: *Loans out standing* (pinjaman yang beredar)

NPA_{it} : *Non performing asset* (aktiva produktif yang bermasalah), terdiri dari aktiva produktif yang berdasarkan tingkat kolektibilitasnya yang dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu : kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).

ΔNPA_{it+1} : Selisih *non performing assets t+1* dengan *non performing asset t*.

3. Menghitung akrual kelolaan (DA_{it}) sebagai proksi EM dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut :

$$DA_{it} = TA_{it} - NDA_{it}$$

DA_{it} : Akrual kelolaan bank i pada tahun t

TA_{it} : Total akrual (untuk model akrual khusus total akrual dihitung berdasarkan total saldo penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) bank I pada tahun t

NDA_{it} : Akrual non kelolaan bank i pada tahun t

Dalam hal ini asset produktif terdiri dari penanaman bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan, dan penanaman lainnya yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Ada empat macam asset produktif, yaitu :

- Kredit yang diberikan. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- Surat-surat berharga. Surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
- Penempatan dana pada bank lain. Aktiva produktif bank yang dananya disalurkan kepada bank lain dalam bentuk penempatan pada bank lain.
- Penyertaan. Penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka pendirian maupun ikut serta dalam operasi lembaga keuangan lain, termasuk penyertaan sementara dalam rangka restrukturisasi kredit atau lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR, tanggal 27 Februari 1998 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan cadangan, ditetapkan ke dalam lima golongan kolektibilitas, yaitu :

1. Lancar

- a. Kredit dengan angsuran pokok, dimana tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atau cerukan karena penarikan kredit.
- b. Kredit dengan angsuran untuk KPR. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok atau terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 1 bulan.
- c. Kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran, dimana kredit belum jatuh tempo, dan tidak terdapat tunggakan bunga.

2. Dalam Perhatian Khusus

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok, dan belum melampaui 3 bulan, baik kredit yang ditetapkan masa angsuran bulannya.
- b. Terdapat tunggakan bunga belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang masa angsurannya bulanan.
- c. Terdapat cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau
- e. Dokumen pinjaman lemah.

3. Kurang Lancar

- a. Kredit dengan angsuran di luar KPR, terdapat tunggakan pokok yang :
melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit masa angsurannya kurang 1 bulan; melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan,

tiga bulanan; dan terdapat cerukan akibat penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.

- b. Kredit dengan angsuran untuk KPR, terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 4 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan.
- c. Kredit tanpa angsuran, terdapat tunggakan bunga yang melampaui 4 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan.

Presentase kolektibilitas kredit terdiri dari :

- Lancar = 0 %
- Dalam perhatian khusus = 25 %
- Kurang lancar = 50 %
- Diragukan = 75 %
- Macet = 100 %

1.2.4. Hubungan *Good Corporate Governance* terhadap *Earning Management*

Mekanisme GCG membutuhkan suatu bentuk laporan konkrit yang dapat menggambarkan kondisi perusahaan dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham. Berdasarkan laporan ini, terlihat apakah kinerja perusahaan memiliki tata kelola yang baik dan efektif GCG dan dari tata kelola tersebut apakah dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen dalam perusahaan seperti aktivitas EM. Laporan ini berbentuk laporan keuangan. Suatu perusahaan yang menganut GCG, tentunya akan mengutamakan transparansi dalam pelaporan keuangannya baik dari manajer kepada pemegang saham, maupun kepada publik. Dody Hapsoro, 2006 dalam Indri (2011)

menyatakan bahwa baik tidaknya GCG seharusnya dapat dilihat dari dimensi keterbukaan (transparansi). Transparansi dapat dilihat pada laporan keuangan yang sangat mendetail pada catatannya, sehingga publik dapat mengetahui sumber-sumber dana dan pengeluaran yang dilakukan perusahaan tersebut. Transparansi akan membuktikan apakah perilaku opportunistik manajemen terjadi atau tidak sehingga membuktikan tata kelola perusahaan bersangkutan baik atautkah tidak.

1.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran diatas menggambarkan adanya indikasi bahwa GCG berpengaruh terhadap EM yang diukur berdasarkan 11 (sebelas) indikator Penilaian Pelaksanaan GCG yang tertera dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/2013 bagi semua Bank umum konvensional di Indonesia. Sebelas faktor penilaian GCG tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi semua Bank umum konvensional yang akan melaksanakan GCG.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan skema kerangka pemikiran tersebut diatas, didapatkan hipotesis atas penelitian sebagai berikut:

H₁ : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap manajemen laba